



Dr Surahma Asti Mulasari SSI MKes
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat
(FKM) UAD Yogyakarta.

Beberapa waktu lalu, jika melintasi jalan-jalan di Yogyakarta, maka timbunan sampah menjadi pemandangan cukup lazim. Hal tersebut terjadi lantaran kondisi sampah-sampah yangmasuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, rata-rata telah mencapai 700 ton per hari—yang dihasilkan Kota Yogyakarta mencapai sekitar 370 ton, 260 ton di antaranya dibuang ke TPA Piyungan dan bank sampah, serta sisanya diolah pemulut. Volume sampah meningkat ketika memasuki musim liburan, dengan kenaikan mencapai 15% dari rata-rata timbulan sampah harian. Sistem pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY)

Pemberdayaan Masyarakat Yogya dalam Kondisi Darurat Sampah



menjadi lumpuh takkala Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan tidak bisa lagi beroperasi sebagaimana mestinya. TPST Piyungan sendiri, selama ini merupakan simbol pengelolaan sampah DIY. Status darurat sampah, dengan kondisi demikianmenjadi ancamannyata di depan mata.

Sejak empat tahun terakhir (2019-2022), blokade akses ke TPST Piyungan pernah terjadi beberapa kali, dan berakibat pada kondisi persampahan di Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman mengalami kekacauan: truk sampah tidak bisa melakukan pembuangan, dan sampah-sampah akhirnya bertebangan. Berbagai tuntutan dilayangkan warga, seperti perbaikan TPST, serta solusi penanganan bau tak sedap demi kenyamanan warga sekitar. Hal tersebut makin menegaskan kondisi siaga, sebelum bencana sampah yang sebenarnya dapat terjadi.

Yang terbaru, blokade TPST Piyungan dilakukan sekitar tanggal 7-11 Mei 2022, dan segera menjadi isu menonjol. Warga kembali

mengeluhkan memprihatinkannya kondisi TPST serta dampak dari limbah. Akses sendiri kembali dibuka pada 12 Mei, setelah ada kesepakatan antara perwakilan Pemerintah Daerah DIY (PUP-ESDM DIY dan DLHK DIY) dengan perwakilan warga. Kesepakatan berkisar pada solusi teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan yang harus beroperasi sebelum 2025, optimalisasi Instalansi Pengolahan Air Lindi dan perbaikan outlet pembuangan lindi, kajian air bersih warga, penggunaan dan pemanfaatan zona transisi, membebaskan lahan memperhatikan kepentingan penduduk, serta adanya perhatian terhadap armada pengangkut sampah.

Isu mengenai batas umur teknis TPST Piyungansudah berembus sejak tahun 2015. Idealnya, solusi pengelolaan TPST sudah harus ada tiga tahun sebelum habis masa berlakunya. Durasi tersebut diperlukan untuk adaptasi metode

atau pengondisian lokasi baru apabila TPST terkait akan dipindahkan. Hanya saja, proses pengembangan TPST Piyungantidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Terdapat tahapan: pergantian pengelolaan ke level provinsi; peninjauan kerja sama dengan investor; studi kelayakan metode pengelolaan sampah; serta diskusi-diskusi dan jajak pendapat yang melibatkan berbagai kalangan.

Kondisi penutupan TPST, ditambah mulai munculnya kepanikan warga, semestinya menjadi penguat yang dapat mendorong pemerintah segera mengambil tindakan, yakni langkah-langkah mengatasi permasalahan teknis di TPST Piyungan. Keputusan memperluas dan memanfaatkan teknologi tertentu—sebagaimana kesepakatan sebelumnya—harussegera dieksekusi, sebab jika terjadi blokade lagi, maka penyelesaian akan menjadi semakin berlarut.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan ialah pemberdayaan masyarakat Yogyakarta

sendiri.Ancaman darurat sampah, tentunya tidak mungkin hanya dibebankan dan menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Metode pemberdayaan masyarakat diperlukan karena pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan di hilir, tetapi juga lewat pembudayaan masyarakat sadar lingkungan, khususnya dalam mengolah sampah dari sumbernya. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku perlu diupayakan. Jangan ada yang berpandangan bahwa hasil dari pengelolaan, tidak sebanding rumitnya pelaksanaan. Pandangan-pandangan demikian, selain menimbulkan ancaman darurat sampah, juga secara nyata merugikan pihak-pihak lain, yakni warga sekitar TPST yang kualitas lingkungan hidupnya menjadi rusak dan berada dalam bayang-bayang penyakit. Masyarakat harus lebih peka dalam melihat realitas persampahan Yogya saat ini.

Langkah nyata dari masyarakat penyumbang sampah, dapat dimulai darilingkungan terdekat. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai

kompos dengan bantuan komposter, keranjang takakura, biopori, ataupun pengolahan komunal. Sementara itu, sampah anorganik (kertas, dsb.)dapat dipilah, kemudian ditabung di bank sampah, lantas dijual sebagai rongsook kepada pengepul atau lewat aplikasi Android—bahkandapat pula disedekahkan bagi pemulut atau lembaga-lembaga pengelola sedekah sampahlainnya.

Selain upaya-upaya pengolahan, kesadaran menghentikan kebiasaan membuang sampah di jalan, sungai, atau pekarangan kosong juga perlu dibangun. Kita amat perlu membuang sampah pada tempat yang tepat, sertameminimalisasi penggunaan kantong plastik. Dengan adanya darurat sampah di DIY hari ini, langkah-langkah sederhana yang notabene hari-hari sebelumnya barangkali tidak kita pandang vital perannya, dapat kita jadikangerakan pembaharuan yang nyata, mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, masyarakat, hingga lingkungan dalam cakupan yang lebih luas lagi.

GELOMBANG TINGGI TERJANG PANTAI SELATAN

2 Wisatawan Diselamatkan SAR, 1 Kapal Nelayan Rusak

WONOSARI (KR) - Gelombang tinggi kembali menerjang kawasan pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul dan terjadi sejak Selasa (24/5) subuh kemarin.

Sebanyak 2 orang wisatawan di Pantai Drini nyaris tenggelam akibat terseret gelombang pasang yang tiba-tiba datang. Dilaporkan terdapat satu buah kapal milik nelayan yang diparkir di Pantai Baron juga sempat terseret ombak dan berhasil diselamatkan dalam keadaan rusak. Koordinator SAR Satlinmas Wilayah II DIY Mardjono, menyatakan, kapal tersebut diparkirkan di tepi pantai Baron, Tanjungsari. Naasnya, tiba-tiba gelombang tinggi men-

erjang kawasan Pantai Baron. Derasnya gelombang membuat sejumlah kapal-kapal milik warga terhempas jauh terbawa arus. "Satu buah kapal terbawa arus dan berhasil kami amankan," katanya Selasa (24/5).

Dampak gelombang tinggi juga terjadi di pantai selatan Gunungkidul juga menyebabkan dua wisatawan Yogik (25) dan Tintoko (24) warga Kapanewon Semanu, Gunungkidul yang tengah berwisata di Pantai Drini, Tanjungsari. Kedua nela-

yan tersebut nyaris fatal lantaran saat kejadian, kedua wisatawan tersebut tengah berenang di perairan laut. Keduanya mengaku tidak menyangka akan ada gelombang pasang yang sempat menyeret ke perairan laut dalam akibat terbawa arus gelombang. Kedua wisatawan tersebut sempat terbawa arus gelombang tinggi dan sudah berada di zona bahaya.

"Kita bersyukur kedua wisatawan tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Tim SAR," ujarnya.

Dari informasi Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) yang diperoleh, diperki-

rakan gelombang tinggi di pesisir Gunungkidul masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari kedepan. Ketinggian gelombang pasang diperkirakan mencapai 13 kaki atau sekitar 3,5 meter.

Menyikapi kejadian tersebut, Tim SAR memperingatkan nelayan agar segera mengevakuasi kapal mereka ke tempat yang aman dan jauh darijangkauan ombak agar tidak rusak atau terbawa arus saat gelombang tinggi menerjang.

"Hingga saat ini tim SAR masih berjaga di sepanjang pantai untuk mengantisipasi dampak gelombang tinggi," pungkasnya. **(Bmp)**

LUNCURKAN PERANGKO DESA WISATA

Gunungkidul Gali Potensi, Sejahterakan Masyarakat

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta meluncurkan Perangko Desa Wisata di kawasan Embung Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Minggu (22/5). Peluncuran ini nantinya diharapkan akan semakin dapat mendorong promosi wisata. Sehingga Gunungkidul akan semakin dikenal baik nasional maupun internasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. i Peluncuran ini sebagai salah satu promosi wisata. Karena Gunungkidul memiliki banyak keindahan alam, seni budaya, dan sektor ekonomi kreatif yang bisa menjadi modal penting dalam mengembangkan potensi pariwisata di desa wisata," kata H Sunaryanta. Kegiatan dihadiri man-



KR-Dedy EW

H Sunaryanta meluncurkan perangko desa wisata.

tan Bupati Gunungkidul Hj Badingah, Ketua DPRD Endah Subekti Kuntariningsih, Kepala Dispar Arif Aldian, Kepala Dispar DIY, Kementerian Kominfo, muspida dan undangan. Kegiatan dalam rangka hari jadi Gunungkidul ke 191 juga ditampilkan kolosal senam kreasi, pameran UMKM, Rumandika Akustik, Jaeko, Tari Tayub dan

Dapur Musik bersama Bagus Guyon Waton. "Gunungkidul *Weekend Fest* ini kolaborasi Dispar Gunungkidul, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dalam menyajikan keragaman potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, budaya dan juga olahraga rekreasi di Gunungkidul," ujarnya. **(Ded/Bmp)**

SOSIALISASI PAJAK RANMOR DI PATUK

KPPD Berharap Wajib Pajak Penuhi Kewajiban

WONOSARI (KR) - Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Gunungkidul melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP) Kendaraan Bermotor (KBM) di Kapanewon Patuk dengan melibatkan para lurah, perangkat kalurahan dan tokoh masyarakat.

Kepala KPPD Gunungkidul M Yuliyanto SIP MPA menyatakan dilibatkannya para lurah dan pamong desa ini diharapkan berdampak langsung terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat di Kapanewon Patuk masih ditemukan adanya penunggak pajak. Berdasarkan data hingga bulan April 2022 ada sebanyak 16.974 wajib pajak

tetapi masih ada sebanyak 3.221 WP atau Rp 228.957.000,- belum membayar. i Kami akan terus berupaya agar kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya terpenuhi," katanya di sela sosialisasi di Balai Kalurahan Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, Senin (23/5).

Sosialisasi di Kapanewon Patuk dihadiri ratusan peserta terdiri dari lurah maupun pamong kalurahan hingga dukuh. Dengan dihadiri Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu B SPd MSi, Panewu Anom Patuk Esy Suharto, Baur STNK Satlantas Aiptu Hery dan Isnan perwakilan dari PT Jasa Raharja (Persero) DIY. Banyak pertanyaan



KR-Bambang Purwanto

Sosialisasi pajak ranmor di Kapanewon Patuk.

dilontarkan peserta sosialisasi yang di antaranya menyangkut soal kewajiban pajak dan kebijakan pemerintah berkaitan tentang kewajiban pajak dan mekanisme proses pembayaran pajak kendaraan bermotor "Kami tingkatan pelayanan dengan membuka 10 lokasi pelayanan se Kabupaten Gunungkidul,"

ujarnya.

Menurut Yulianto, untuk target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2022 dipatok sebesar Rp 113.758.500.000,- terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 79 miliar, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 34.758.500.000,- **(Bmp)**

MCU-RSUD Wates Diresmikan

WATES (KR) - RSUD Wates meresmikan Medical Check-Up (MCU) sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat. Peresmian dilakukan Drs H Sutedjo saat masih menjabat Bupati Kulonprogo di Lantai 2 Gedung Rawat Inap RSUD Wates, Sabtu (21/5) lalu.

Bersamaan dengan itu dilakukan pula pisah sambutan Direktur RSUD Wates dari Plt dr Lies Indriyati SpA kepada Direktur yang baru dr Eko Budiarto MKes SpAn.

Keberadaan MCU di RSUD Wates ini, dikatakan Sutedjo, masyarakat yang membutuhkan layanan dapat memanfaatkannya, tanpa harus jauh-jauh pergi ke daerah lain.



KR-Widiastuti

Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan.

"Kepada segenap civitas hospital RSUD Wates, untuk menyadari bahwa tuntutan masyarakat akan mutu layanan kesehatan semakin meningkat," katanya.

Peresmian gedung baru ini, lanjut Sutedjo, dijadikan momentum berkomitmen mewujudkan rumah

sakit yang nyaman dan mengupayakan kinerja serta pelayanan terbaik seperti rumah sakit swasta.

"Bersama-sama berkomitmen memberikan layanan yang terbaik kepada warga masyarakat, dalam rangka melayani, bekerja dan menjalankan amanah," tuturnya. **(Wid)**

Deklarasi Paguyuban Jagabaya 'Wisanggeni'



KR-Asrul Sani

Jagabaya se-Kulonprogo berjanji penuh dedikasi melayani masyarakat.

PANJATAN (KR) - Jagabaya (Kasi Pemerintahan Kalurahan) se-Kabupaten Kulonprogo membentuk Paguyuban 'Wisanggeni'. Sebagai upaya menunjukkan eksistensinya, mereka deklarasi sekaligus syawalan. Pembacaan deklarasi dipimpin Wakil Ketua Paguyuban Wisanggeni yang juga Jagabaya Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates, Supriyono, diikuti seluruh pengurus dan anggota paguyuban salah satu pamong di tingkat pemerintah kalurahan tersebut.

Dalam deklarasinya mereka menyatakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

penuh dedikasi, melayani masyarakat, dengan pengabdian terbaik dan penuh tanggungjawab.

"Latar belakang kami membentuk paguyuban, selain para lurah dan pamong lainnya telah membentuk paguyuban masing-masing maka kami juga ingin lebih spesifik membentuk paguyuban juga sebagai media agar mudah dalam berkoordinasi," kata Ketua Paguyuban Wisanggeni Bambang Santoso di sela deklarasi di Rumah Makan Yulian Fega di Kalurahan Cerme Kapanewon Panjatan Kulonprogo, Minggu (22/5).

Lebih lanjut Bambang Santoso yang menjabat Jagabaya Kalurahan Jatirejo

Kapanewon Lendah itu mengungkapkan, pembentukan paguyuban juga bertujuan agar terjalin hubungan lebih harmonis antarjagabaya di seluruh Kabupaten Kulonprogo baik secara pribadi maupun jabatan. Dengan terbentuknya paguyuban pihaknya berharap pengabdian dan perjuangan para Jagabaya akan semakin nyata dan solid.

"Melalui Paguyuban Wisanggeni kami yakin apa yang selama ini menjadi keprihatinan para Jagabaya akan lebih mudah diperjuangkan. Seperti saat kami menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Kulonprogo tentang adanya rencana revisi batasan usia pamong khususnya Jagabaya yang semula 64 tahun akan dikurangi menjadi 60 tahun. Hal-hal seperti itu yang akan kami perjuangkan dan aturan batasan usia tidak jadi direvisi tetap 64 tahun," ungkap Bambang didampingi Jagabaya Kalurahan Triharjo Bambang Handaya. Hal senada disampaikan Seksi Advokasi Paguyuban Wisanggeni, Rismanto. **(Rul)**

PTM di Kulonprogo Harus Tetap Berjalan

PENGASIH (KR) - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulonprogo harus tetap berjalan, kalau bisa 8 jam pelajaran (JPL) segera dipenuhi. Sebab bila kesempatan tatap muka tidak dipenuhi, pengaruh dari luar jam sekolah luar biasa dahsyatnya. Sehingga PTM terus dilaksanakan.

Hal itu dikatakan Istana SH MIP Ketua Komisi IV dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulonprogo, Senin (23/5). "Sejak awal pandemi saya yang mendorong PTM bisa dilaksanakan apapun kondisinya. Waktu itu yang bisa dibuat pos-pos simulasi di berbagai sekolah. Ternyata baik dan harus dikembangkan, sepanjang protokol kesehatan dijaga atau dipenuhi ungapnya.

Menurut Istana, di luar negeri tidak ada sekolah tutup. "Saya tidak meremehkan belajar dari rumah (BDR). Saya mencermati fasilitas, persiapan/ kesiajan, kemampuan BDR itu minim. Orangtua tidak

dipersiapkan, signal lemah, dan tidak punya infrastruktur. Kekhawatiran saya terhadap kualitas SDM atau capaian indikator sasaran kualitas pendidikan di Kulonprogo," ucapnya.

Indikator peningkatan kualitas pendidikan masyarakat tidak bisa semata-mata diukur dengan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek huruf. Ini global sekali.

Kita harus melihat lebih luas bahwa Indikator prestasi setidaknya tergantung enam ornamen: pertama, siswa. PTM memberi ruang kepada siswa agar belajar lebih disiplin. Di situ

ada tatap muka dan komunikasi. "Kedua, guru. Guru punya kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai fasilitator. Ketiga, sarana dan prasarana sekolah. Sarana bagus memenuhi syarat ideal, nyaman akan menambah kualitas atau meningkatkan indikasi prestasi," urai Istana.

Kemudian keempat, keberpihakan anggaran. "Kami kurang apa di Dinas Pendidikan anggaran terbesar dan cukup jika tata kelolanya bagus. Kelima, kurikulum. Kita tahu diatur kurikulum dari Kementerian Pendidikan, tetapi di lokal harus mengem-



KR-Widiastuti

Istana SH MIP

bangkan kurikulum tersebut. Belum lagi ada kurikulum Merdeka Belajar. Serta keenam peran masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga indikasi SDM di Kulonprogo," pungkasnya. **(Wid)**

